JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 01, Tahun 2026, Hal. 1978-1988, ISSN: 3089-0128 (Online)

Penanganan dan Pemulihan Anak Pekerja Migran Indonesia yang Terlantar akibat Kasus Hukum Narkotika di Malaysia 2026 dalam Perspektif Multi-Level Governance

Siti Nurlaily Tsuroyya Mutholibi[1], Zudan Rosyidi[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia*
e-mail: nurlailytsuroyyamutholibi@gmail.com

Article Info

Article history:

Received September 03, 2026
Revised September 28, 2026
Accepted October 02, 2026

Keywords:

PMI, Abandoned Children, UPT P2TK, Human Security, State Protection.

ABSTRACT

This research discusses the role of UPT P2TK in the handling and recovery of children of Indonesian migrant workers (PMI) who were abandoned due to narcotics cases that befell their parents in Malaysia. This phenomenon shows that the problem of migrant workers not only has an impact on individual workers, but also creates a new vulnerability for children as a group that needs special protection. This research uses the Human Security approach to analyze how the state is present not only in the form of legal protection, but also in the fulfillment of individual security aspects such as physical, social, and psychological safety of children. The method used is qualitative research with a case study approach. Data was obtained through interviews, observations, and documentation studies related to the process of handling and recovery of abandoned PMI children. Research results show that UPT P2TK has an important role in the stages of acceptance, data collection, fulfillment of basic needs, and social assistance for children. In addition, UPT also plays a role in the process of reintegrating children into the family or community environment. However, in the perspective of human security, there are still challenges in the aspect of psychological recovery and the sustainability of children's social protection. This study concludes that the role of UPT P2TK is an important part of the state's efforts in comprehensively protecting citizens, especially children as vulnerable groups. Therefore, it is necessary to strengthen policies and coordination between institutions to ensure sustainable protection and based on individual needs.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:

Received September 03, 2026
Revised September 28, 2026
Accepted October 02, 2026

Keywords:

PMI, Anak Terlantar, UPT P2TK, Human Security, Perlindungan Negara.

ABSTRACT

Penelitian ini membahas peran UPT P2TK dalam penanganan dan pemulihan anak pekerja migran Indonesia (PMI) yang terlantar akibat kasus hukum narkotika yang menimpa orang tua mereka di Malaysia. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan pekerja migran tidak hanya berdampak pada individu pekerja, tetapi juga menimbulkan kerentanan baru bagi anak sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan Human Security untuk menganalisis bagaimana negara hadir tidak hanya dalam bentuk perlindungan hukum, tetapi juga dalam pemenuhan aspek keamanan individu seperti keamanan fisik, sosial, dan psikologis anak. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi yang berkaitan dengan proses penanganan dan pemulihan anak PMI terlantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT P2TK memiliki peran penting dalam tahapan penerimaan, pendataan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta

pendampingan sosial bagi anak. Selain itu, UPT juga berperan dalam proses reintegrasi anak ke lingkungan keluarga atau masyarakat. Namun, dalam perspektif human security, masih terdapat tantangan dalam aspek pemulihan psikologis dan keberlanjutan perlindungan sosial anak.Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran UPT P2TK merupakan bagian penting dari upaya negara dalam melindungi warga negara secara komprehensif, khususnya anak sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan koordinasi antar lembaga guna memastikan perlindungan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan individu.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Siti Nurlaily Tsuroyya Mutholibi, Zudan Rosyidi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia
Email: nurlailytsuroyyamutholibi@gmail.com

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri merupakan salah satu agenda utama dalam kebijakan negara terutama dalam konteks meningkatnya mobilitas tenaga kerja migran ke berbagai negara tujuan. Dalam praktiknya negara tidak hanya bertanggung jawab pada tahap penempatan tenaga kerja saja tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh sebelum, selama, dan setelah masa kerja di luar negeri. Hal ini menjadi penting mengingat pekerja migran Indonesia masih sering menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari pelanggaran kontrak kerja, eksploitasi, hingga keterlibatan dalam kasus hukum yang berdampak serius terhadap kondisi sosial dan psikologis mereka. Dalam konteks ini perlindungan terhadap warga negara tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi luar negeri seperti KBRI atau KJRI tetapi juga memerlukan keterlibatan institusi domestik sebagai bagian dari sistem perlindungan yang berkelanjutan.(Rifawan et al., 2018) Dalam sistem perlindungan tersebut, negara membentuk berbagai institusi yang bertugas untuk menangani pekerja migran, termasuk dalam proses pemulangan dan penanganan pasca kepulangan. Salah satu bentuk implementasi perlindungan tersebut adalah melalui lembaga teknis di tingkat domestik yang memiliki peran langsung dalam menangani pekerja migran setelah kembali ke Indonesia. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa perlindungan negara tidak bersifat parsial, melainkan melibatkan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang ada masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga serta lemahnya sektor pencegahan dalam sistem perlindungan warga negara di luar negeri.(Rifawan et al., 2018, p. ibid.,)

Perlindungan terhadap pekerja migran tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi migrasi tenaga kerja. Indonesia sebagai negara berkembang masih mengandalkan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai salah satu strategi untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun memberikan kontribusi ekonomi melalui remitansi, fenomena ini juga menimbulkan berbagai konsekuensi sosial, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah terhadap anak-anak pekerja migran yang harus hidup dalam kondisi terpisah dari orang tua atau bahkan berada dalam situasi yang tidak terlindungi.(Kunarti et al., 2023) Anak pekerja migran merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi dalam

sistem migrasi internasional. Mereka tidak hanya menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga sering kali berada dalam kondisi yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, anak-anak yang terdampak migrasi sering kali mengalami apa yang disebut sebagai "*legal invisibility*" yaitu kondisi di mana mereka tidak diakui secara administratif sehingga tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara.(Orginski, n.d.)

Kerentanan ini semakin diperparah oleh status migrasi yang tidak jelas, terutama bagi anak-anak yang lahir di negara tujuan atau tidak memiliki dokumen resmi. Kondisi ini menyebabkan mereka berada di luar jangkauan sistem perlindungan negara, baik di negara asal maupun di negara tujuan. Selain itu anak-anak migran juga menghadapi berbagai bentuk marginalisasi seperti keterbatasan akses pendidikan formal, layanan kesehatan, serta risiko eksploitasi dan diskriminasi.(Hastira & Maksum, 2025) Dalam konteks Indonesia, permasalahan anak pekerja migran juga berkaitan dengan fenomena anak yang ditinggalkan (*left-behind children*) yaitu dimana anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bekerja di luar negeri. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dalam kategori ini sering mengalami kekurangan pengasuhan yang memadai, yang berdampak pada perkembangan emosional, sosial, dan pendidikan mereka. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga serta kurangnya mekanisme perlindungan yang terintegrasi menyebabkan banyak kasus keterlantaran anak tidak tertangani secara optimal.(Maemunah et al., 2025) Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pekerja migran terlibat dalam kasus hukum di negara tujuan, khususnya dalam kasus narkotika. Kasus hukum yang melibatkan pekerja migran tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap keluarga yang ditinggalkan, terutama anak. Dalam situasi ini, anak pekerja migran tidak hanya kehilangan figur pengasuh utama, tetapi juga berpotensi mengalami keterlantaran, ketidakpastian status hukum, serta kesulitan dalam mengakses layanan dasar.

Kasus narkotika menjadi salah satu bentuk permasalahan hukum yang memiliki konsekuensi serius, karena sering kali berujung pada penahanan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menyebabkan anak pekerja migran harus hidup dalam kondisi yang tidak stabil, bahkan sejak lahir. Dalam beberapa kasus, anak harus menjalani kehidupan tanpa pengasuhan orang tua dan menghadapi berbagai risiko, termasuk masalah kesehatan, kurangnya akses layanan, serta tekanan psikologis. Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak migrasi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat struktural dan lintas generasi. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan yang hanya berfokus pada pekerja migran sebagai individu tidak cukup untuk menjawab kompleksitas permasalahan yang ada. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mampu melihat individu sebagai pusat dari keamanan, termasuk anak sebagai kelompok rentan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh proses migrasi. onsep keamanan manusia (*human security*) menjadi relevan untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan ini. Pendekatan ini menekankan bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan negara sebagai entitas politik tetapi juga mencakup perlindungan terhadap individu dari berbagai ancaman, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan ini, perlindungan terhadap anak pekerja migran dapat dilihat secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga dari aspek kesejahteraan dan keamanan individu. Selain itu, fase pasca pemulangan menjadi tahap yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya. Proses pemulangan tidak dapat dipahami sebagai akhir dari tanggung jawab negara, melainkan sebagai bagian dari proses yang lebih luas yang mencakup pemulihan dan reintegrasi sosial. Penelitian menunjukkan bahwa program reintegrasi pekerja migran di Indonesia masih bersifat terbatas, tidak terkoordinasi dengan baik, serta belum mampu menjawab kebutuhan yang beragam dari

pekerja migran yang kembali, terutama bagi mereka yang mengalami permasalahan selama bekerja di luar negeri.(Bachtiar et al., n.d.)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai bagaimana peran institusi negara di tingkat domestik dalam menangani anak pekerja migran Indonesia yang terlantar akibat kasus hukum narkotika orang tua di Malaysia, serta bagaimana kondisi kerentanan yang dialami oleh anak dalam situasi tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana proses penanganan dan pemulihan yang dilakukan terhadap anak pekerja migran tersebut, khususnya jika dilihat melalui perspektif keamanan manusia yang menekankan pentingnya perlindungan individu sebagai bagian dari tanggung jawab negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis peran UPT P2TK dalam penanganan dan pemulihan anak pekerja migran Indonesia (PMI) yang terlantar akibat kasus hukum narkotika di Malaysia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, peran, serta dinamika kelembagaan dalam konteks perlindungan kelompok rentan, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Secara metodologis penelitian ini berada pada level of analysis sub-state, karena berfokus pada institusi negara di tingkat domestik sebagai pelaksana kebijakan. Negara disini tidak dilihat sebagai entitas tunggal melainkan sebagai kumpulan aktor institusional yang menjalankan fungsi perlindungan. Adapun unit of analysis dalam penelitian ini adalah UPT P2TK, yang dianalisis sebagai aktor pelaksana dalam proses penanganan dan pemulihan anak PMI terlantar. Sementara itu anak pekerja migran Indonesia yang terdampak merupakan objek penelitian karena menjadi pihak yang menerima intervensi kebijakan dan layanan dari institusi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam praktik penanganan dan pemulihan yang dilakukan oleh UPT P2TK. Studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual terhadap fenomena yang kompleks khususnya yang berkaitan dengan isu migrasi internasional perlindungan warga negara serta dampak sosial dari kasus hukum lintas negara.(Mello, 2017) Fokus kasus dalam penelitian ini adalah anak PMI yang terlantar akibat keterlibatan orang tua dalam kasus narkotika di Malaysia yang kemudian dipulangkan ke Indonesia dan ditangani oleh UPT P2TK.

Dalam kerangka analisis penelitian ini menggunakan perspektif Human Security yang menempatkan individu sebagai pusat keamanan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana peran UPT P2TK tidak hanya memenuhi aspek perlindungan hukum, tetapi juga mampu menjamin keamanan personal, sosial, dan kesejahteraan anak sebagai kelompok rentan. Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada prosedur administratif tetapi juga pada kualitas pemulihan dan keberlanjutan perlindungan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, khususnya aparatur atau petugas di UPT P2TK yang terlibat langsung dalam proses penanganan dan pemulihan anak PMI. Observasi juga dilakukan untuk memahami secara langsung mekanisme pelayanan dan interaksi antara institusi dengan penerima layanan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, seperti laporan resmi, regulasi pemerintah, jurnal ilmiah, serta publikasi yang relevan dengan isu pekerja migran, perlindungan anak, dan human security.(Gammelgaard, 2017)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Observasi

dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik penanganan di lapangan. Sementara itu dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka human security untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk menjaga validitas data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan cross-check terhadap informasi yang diperoleh guna memastikan keakuratan dan konsistensi data. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai peran UPT P2TK dalam penanganan dan pemulihan anak PMI terlantar serta menilai sejauh mana praktik tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip human security dalam perlindungan kelompok rentan.

HASIL

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui dokumen resmi serta wawancara dengan informan, penelitian ini menemukan bahwa kasus pemulangan pekerja migran Indonesia dari Kuala Lumpur mencerminkan kompleksitas permasalahan migrasi yang tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan yang serius, terutama ketika melibatkan anak sebagai pihak yang terdampak langsung. Kasus yang diteliti berpusat pada seorang pekerja migran perempuan bernama Rusmiana yang bekerja di Malaysia dan menghadapi permasalahan hukum terkait penggunaan narkotika. Selama menjalani proses hukum di Malaysia, Rusmiana meninggalkan seorang bayi bernama Andika Saif di rumah sakit Tuanku Ja'afar, Negeri Sembilan, dalam kondisi kesehatan yang sangat rentan, yaitu mengalami penyakit jantung bocor serta sifilis. Kondisi ini menjadikan anak tersebut sebagai kelompok yang sangat rentan secara kesehatan maupun sosial. Berdasarkan dokumen resmi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, bayi tersebut berada di bawah pengawasan otoritas Indonesia selama ibunya menjalani masa tahanan. Setelah Rusmiana menyelesaikan masa hukumannya pada Januari 2026, proses pemulangan kemudian difasilitasi oleh KJRI Johor Bahru melalui koordinasi dengan berbagai pihak di Indonesia termasuk BP3MI Dinas Tenaga Kerja, serta UPT P2TK (Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Baru, komunikasi pribadi, 13 Februari 2026).Proses pemulangan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2026 melalui jalur udara menuju Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Setibanya di Indonesia, dilakukan proses pendampingan oleh berbagai instansi yang terlibat, antara lain Dinas Sosial Jawa Timur DP3AK, RSUD dr. Soetomo, serta UPT P2TK. Penanganan ini meliputi proses pendataan, dokumentasi, serta serah terima kepada pihak terkait untuk penanganan lanjutan, khususnya dalam aspek kesehatan anak dan reintegrasi sosial keluarga.

Hasil wawancara dengan Bapak Budi sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam proses penanganan menunjukkan bahwa penanganan kasus ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan pendekatan kemanusiaan yang komprehensif. Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa kondisi anak menjadi prioritas utama sehingga penanganan langsung diarahkan pada layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa proses pemulangan berjalan dengan lancar dan kebutuhan korban dapat terpenuhi secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa kasus pekerja migran tidak hanya berhenti pada individu pekerja tetapi juga berdampak pada keluarga terutama anak yang sering kali menjadi pihak paling rentan. Oleh karena itu, penanganan kasus semacam ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada

prosedur tetapi juga pada perlindungan terhadap individu sebagai subjek utama (Budiono UPTP2TK,2026).

PEMBAHASAN

1. Multi-Level Governance dalam Penanganan dan Pemulihan Anak Pekerja Migran Indonesia

Kasus pekerja migran Indonesia yang menjadi fokus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses penanganan anak pekerja migran tidak dilakukan oleh satu institusi saja melainkan melibatkan berbagai aktor pada level yang berbeda. Mulai dari proses pengawasan selama kasus hukum berlangsung di Malaysia proses repatriasi hingga penanganan lanjutan setelah tiba di Indonesia, seluruh tahapan dilakukan melalui koordinasi antar lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Keterlibatan berbagai aktor tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran, khususnya anak sebagai kelompok rentan, memerlukan mekanisme tata kelola yang bersifat kolaboratif dan lintas level. Oleh karena itu, pembahasan dalam bagian ini difokuskan pada bagaimana koordinasi antar institusi tersebut berlangsung dalam proses penanganan dan pemulihan anak pekerja migran, serta bagaimana peran masing-masing aktor dijalankan dalam kerangka multi-level governance.

Pendekatan Multi-Level Governance menjelaskan bahwa pengelolaan suatu isu publik tidak hanya dilakukan oleh satu aktor negara secara terpusat, tetapi melibatkan berbagai institusi pada tingkat internasional, nasional, hingga lokal. Dalam pendekatan ini, proses kebijakan dan implementasi berlangsung melalui hubungan yang saling terhubung antar aktor dengan kewenangan yang berbeda. Konsep ini menjadi relevan dalam isu migrasi karena permasalahan migrasi memiliki karakter lintas batas yang membutuhkan koordinasi antar lembaga dalam setiap proses penanganannya.

Level internasional terlihat melalui keterlibatan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran dan anak selama proses hukum berlangsung di Malaysia. Berdasarkan dokumen penanganan PMI/WNI anak atas nama Andika Saif berada di bawah pengawasan KJRI Johor Bahru selama ibunya menjalani masa tahanan akibat kasus narkotika. Selain itu juga pihak KBRI Kuala Lumpur juga berperan dalam membantu proses pengurusan repatriasi dan administrasi dengan pihak imigrasi Malaysia hingga proses pemulangan dapat dilakukan.

Keterlibatan institusi diplomatik ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran tidak berhenti pada fungsi administratif semata tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keluarga pekerja migran yang terdampak secara langsung. Dalam konteks multi-level governance, perwakilan negara di luar negeri menjadi bagian penting dalam rantai perlindungan migran karena berfungsi sebagai penghubung antara negara asal dengan pekerja migran yang menghadapi permasalahan di negara tujuan.(Firnanda Haumahu dkk., 2023)

Pada level nasional keterlibatan BP3MI menunjukkan adanya fungsi koordinasi dalam proses pemulangan pekerja migran. Dalam laporan penanganan PMI/WNI, BP3MI Jawa Timur menjadi salah satu institusi yang terlibat dalam proses pendampingan dan fasilitasi pemulangan PMI di Bandara Internasional Juanda. Keterlibatan BP3MI menunjukkan bahwa proses perlindungan pekerja migran tidak hanya dilakukan pada level luar negeri, tetapi juga memerlukan dukungan institusi nasional dalam proses transisi dari negara tujuan menuju daerah asal pekerja migran. Semetara pada level daerah UPT P2TK memiliki peran yang lebih langsung dalam proses penanganan dan pemulihan pasca pemulangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budiono, UPT P2TK tidak hanya melakukan pendataan administratif tetapi juga berkoordinasi dengan berbagai instansi lain seperti Dinas Sosial, DP3AK, serta

RSUD dr. Soetomo dalam memastikan kebutuhan korban dapat ditangani secara menyeluruh.[1] Dalam konteks ini, peran UPT P2TK menjadi penting karena institusi tersebut berada pada level implementasi yang berhadapan langsung dengan kondisi korban di lapangan. Keterlibatan RSUD dr. Soetomo dalam proses penanganan menunjukkan bahwa kasus pekerja migran tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum atau administratif, tetapi juga sebagai persoalan kemanusiaan yang membutuhkan layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Kondisi anak yang mengalami jantung bocor dan sifilis memperlihatkan bahwa proses penanganan membutuhkan pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai sektor pelayanan publik. Hal ini memperkuat bahwa tata kelola perlindungan pekerja migran tidak dapat dijalankan secara sektoral, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan.

Dalam perspektif multi-level governance koordinasi antar aktor menjadi elemen penting dalam menentukan efektivitas penanganan suatu kasus. Pada kasus ini koordinasi terlihat melalui keterhubungan fungsi antar institusi, mulai dari perlindungan di luar negeri, proses repatriasi, hingga penanganan lanjutan di dalam negeri. Setiap institusi menjalankan fungsi yang berbeda namun saling berkaitan dalam satu rantai penanganan. KJRI berperan dalam perlindungan dan pengawasan selama proses hukum berlangsung, BP3MI berfungsi dalam fasilitasi pemulangan, sementara UPT P2TK dan instansi daerah lainnya menjalankan fungsi penanganan dan pemulihan pasca kepulangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar aktor tersebut. Praktiknya kompleksitas penanganan pekerja migran sering kali menimbulkan tantangan dalam sinkronisasi kebijakan dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme koordinasi yang jelas menjadi penting agar proses perlindungan terhadap pekerja migran dan anak yang terdampak dapat berjalan secara optimal.

Meskipun fokus utama penelitian ini terletak pada pola koordinasi antar lembaga dalam perspektif multi-level governance, peran masing-masing institusi tetap menjadi bagian penting dalam analisis. Hal ini karena efektivitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh adanya banyak aktor, tetapi juga oleh bagaimana setiap aktor menjalankan perannya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dengan demikian, pendekatan multi-level governance dalam penelitian ini tidak hanya digunakan untuk melihat keterlibatan berbagai level pemerintahan, tetapi juga untuk memahami bagaimana distribusi peran dan hubungan antar institusi bekerja dalam proses penanganan dan pemulihan anak pekerja migran Indonesia yang terlantar akibat kasus hukum narkotika di Malaysia.

2. Perspektif Human Security dalam Kasus Anak PMI

Kasus yang dialami oleh anak pekerja migran dalam penelitian ini menunjukkan secara jelas bagaimana migrasi dapat menciptakan kerentanan multidimensional, terutama bagi kelompok rentan seperti anak. Dalam perspektif human security keamanan tidak lagi dilihat sebagai perlindungan negara semata melainkan perlindungan terhadap individu dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup dan kesejahteraannya. Dalam kasus ini anak atas nama Andika Saif menghadapi ancaman serius terhadap keamanan kesehatan, yang ditunjukkan dengan kondisi jantung bocor dan sifilis. Selain itu terdapat pula ancaman terhadap keamanan personal dan sosial akibat ditelantarkan oleh orang tua dalam situasi hukum di negara asing. Kondisi ini mencerminkan bagaimana migrasi dapat menghasilkan kerentanan yang kompleks terutama ketika sistem perlindungan tidak mampu menjangkau seluruh aspek kehidupan migran dan keluarganya. Hal ini sejalan dengan kajian mengenai human security yang menekankan bahwa kelompok migran, khususnya perempuan dan anak, merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk ancaman non-tradisional, seperti eksploitasi, ketidakamanan kesehatan, dan keterbatasan akses terhadap perlindungan.(Hastira & Maksum, 2025) Kondisi yang dialami anak dalam penelitian ini juga mencerminkan

kegagalan sistem perlindungan awal di negara tujuan, sehingga intervensi baru dilakukan setelah kondisi menjadi kritis. Dalam konteks ini, human security tidak hanya berbicara tentang respons terhadap krisis tetapi juga pentingnya pencegahan dan perlindungan sejak awal proses migrasi. Pendekatan human security dalam penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran harus mencakup keluarga, terutama anak, sebagai bagian dari subjek keamanan. Negara tidak hanya bertanggung jawab terhadap pekerja migran sebagai individu ekonomi, tetapi juga terhadap kesejahteraan sosial dan kemanusiaan yang melekat pada mereka.

3. Analisis Peran Negara melalui UPT P2TK

Dalam konteks penelitian ini, peran negara tercermin melalui keterlibatan berbagai institusi terutama UPT P2TK sebagai pelaksana teknis di tingkat daerah. Peran ini tidak hanya terbatas pada fungsi administratif tetapi juga mencakup fungsi sosial dan kemanusiaan dalam penanganan kasus pekerja migran. UPT P2TK dalam kasus ini berperan dalam proses penerimaan, pendataan, serta koordinasi dengan instansi lain untuk memastikan bahwa pekerja migran dan anak mendapatkan penanganan yang sesuai. UPT P2TK juga berperan dalam memfasilitasi proses reintegrasi sosial yang menjadi tahap penting dalam penanganan pasca pemulangan. Peran ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir sebagai regulator tetapi juga sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam kajian migrasi peran institusi negara dalam proses reintegrasi menjadi sangat penting karena fase ini sering kali menjadi titik kritis bagi pekerja migran dalam membangun kembali kehidupan mereka. Penelitian mengenai reintegrasi pekerja migran menunjukkan bahwa proses ini tidak selalu berjalan secara linear melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial, serta dukungan institusional. Banyak pekerja migran mengalami kesulitan dalam beradaptasi kembali, terutama ketika tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari negara.(Absor, t.t.) Dalam kasus ini keterlibatan berbagai instansi menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif. Namun demikian efektivitas peran tersebut masih bergantung pada koordinasi antar lembaga serta keberlanjutan program yang diberikan kepada pekerja migran setelah pemulangan. Konsep peran dalam penelitian ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab yang luas dalam penanganan pekerja migran, mulai dari tahap pemulangan hingga reintegrasi sosial. Peran ini harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat memberikan perlindungan yang optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan dan pemulihan anak pekerja migran Indonesia yang terlantar akibat kasus hukum narkotika di Malaysia merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor pada level yang berbeda. Kasus yang dialami oleh Rusmiana dan anaknya, Andika Saif, memperlihatkan bahwa dampak migrasi tidak hanya dirasakan oleh pekerja migran sebagai individu, tetapi juga berdampak langsung terhadap keluarga, khususnya anak sebagai kelompok rentan. Kondisi anak yang mengalami keterlantaran serta gangguan kesehatan menunjukkan adanya kerentanan multidimensional yang mencakup aspek kesehatan, keamanan personal, dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, proses penanganan kasus ini tidak dilakukan oleh satu institusi secara tunggal, melainkan melalui koordinasi berbagai aktor pada level internasional, nasional, dan daerah. Pada level internasional, KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur berperan dalam pengawasan serta proses repatriasi pekerja migran selama menghadapi kasus hukum di Malaysia. Pada level nasional, BP3MI berperan dalam proses koordinasi pemulangan pekerja migran ke Indonesia. Sementara itu, pada level daerah, UPT P2TK bersama instansi lain seperti Dinas Sosial, DP3AK, dan RSUD dr. Soetomo berperan dalam proses penanganan lanjutan dan pemulihan pasca pemulangan.

Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan adanya pola Multi-Level Governance dalam penanganan pekerja migran dan anak yang terdampak. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap pekerja migran tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab satu institusi, tetapi sebagai bentuk tata kelola yang melibatkan koordinasi lintas level dan lintas sektor. Setiap aktor menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam satu rangkaian penanganan yang saling terhubung, mulai dari perlindungan di luar negeri, proses pemulangan, hingga pemulihan di dalam negeri. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan Human Security menjadi relevan untuk memahami kondisi anak pekerja migran sebagai kelompok rentan. Dalam kasus ini, anak tidak hanya terdampak secara administratif akibat proses hukum yang dialami oleh orang tua, tetapi juga menghadapi ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pekerja migran perlu dipahami tidak hanya dalam aspek hukum dan administratif, tetapi juga dalam aspek kemanusiaan yang berorientasi pada perlindungan individu.

Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan anak pekerja migran yang terlantar akibat kasus hukum narkotika memerlukan tata kelola perlindungan yang terintegrasi melalui koordinasi antar lembaga pada berbagai level pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada tahap pemulangan, tetapi juga pada tahap penanganan dan pemulihan pasca kepulangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ant Workers: Economic And Social Challenges In Post-Migration Contexts. n.d.

Bachtiar, Palmira Permata, Dinar Dwi Prasetyo, and Bree Ahrens. Return Migration and Various Reintegration Programs for Low-Skilled Migrant Workers in Indonesia. n.d.

Correa-Cabrera, Guadalupe, and Recomended Citation. Trafficking In Persons Along Mexico's Eastern Migration Routes: The Role Off Transnational Criminal Organization. n.d.

Di Lisio, Giulia, Mercedes Fernández, and Inmaculada Serrano. "Unveiling Vulnerability Determinants Among Migrant-Background Students: A Systematic Review." New Directions for Child and Adolescent Development 2025, no. 1 (2025): 2069119. https://doi.org/10.1155/cad/2069119.

Firnanda Haumahu, Jessica, Christian H.J. De Fretes, and Triesanto Romulo Simanjuntak. "Diplomatic Protection Efforts of the Consulate General of the Republic of Indonesia in Johor Bahru for Indonesian Migrant Workers as the Domestic Helpers (PLRT) in 2018-2019." ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities 3, no. 3 (2023): 335–47. https://doi.org/10.35877/soshum1839.

Hastira, Muhammad Fajhriyadi, and Ali Maksum. RESILIENCE-BASED HUMAN SECURITY: A STUDY OF INDONESIAN MIGRANT CHILDREN AND MUHAMMADIYAH IN MALAYSIA. 5, no. 2 (2025).

Kunarti, Siti, Ulil Afwa, and Sri Hartini. "Strengthening Migrant CARE: A Comprehensive Approach to Ensure Worker Protection and Safeguard the Rights of Indonesian Migrants." Journal of Law and Sustainable Development 11, no. 12 (2023): e1454. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.1454.

Orginski, Trevor. Protecting Children Affected by Migration: Expanded Lessons from the ASEAN Regional Programme and Global Policy Implications. n.d.

Prabaningtyas, Raden Ajeng Rizka Fiani, Tri Nuke Pudjiastuti, Athiqah Nur Alami, Faudzan Farhana, and Arfan. "Access to Education for Refugee Children in Indonesia During the COVID-19 Pandemic: Challenges and Adaptation Strategies." Advances in Southeast Asian Studies Vol. 16 No. 1 (June 2023): 39-61 Pages. 39-61 Pages. https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0089.

Putri, Ria Wierma, Kasmawati, Naek Siregar, and Yunita Maya Putri. "The Dynamics of Indonesian Migrant Workers' Problem (Regulation and Protection Based on Job Creation Law and International Civil Law)." In Proceedings of the 3rd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2022), vol. 740, edited by Ryzal Perdana, Gede Eka Putrawan, Bayu Saputra, and Trio Yuda Septiawan. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Atlantis Press SARL, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_74.

Rifawan, Affabile, Ivan Darmawan, and Riki Relaksana. "A REVIEW ON THE GOVERNANCE OF PROTECTION SYSTEM FOR INDONESIAN CITIZENS ABROAD." Jurnal Asia Pacific Studies 1, no. 2 (2018): 155. https://doi.org/10.33541/japs.v1i2.618.

Surat kepada Kepala BP3MI Jawa Timur (3).pdf

Wawancara bapak budiono selaku petugas UPTP2TK

Absor, M. U. (t.t.). Reintegration Of Indonesian Migrant Workers: Economic And Social Challenges In Post-Migration Contexts.

Bachtiar, P. P., Prasetyo, D. D., & Ahrens, B. (t.t.). Return Migration and Various Reintegration Programs for Low-Skilled Migrant Workers in Indonesia.

Correa-Cabrera, G., & Citation, R. (t.t.). Traficking in Persons Along Mexico''s Eastern Migration Routes: The Role of Transnational Criminal Organizations.

Croese, S., Oloko, M., Simon, D., & Valencia, S. C. (2021). Bringing the Global to the Local: The challenges of multi-level governance for global policy implementation in Africa. International Journal of Urban Sustainable Development, 13(3), 435–447. https://doi.org/10.1080/19463138.2021.1958335

Di Lisio, G., Fernández, M., & Serrano, I. (2025). Unveiling Vulnerability Determinants Among Migrant-Background Students: A Systematic Review. New Directions for Child and Adolescent Development, 2025(1), 2069119. https://doi.org/10.1155/cad/2069119

Elliott, L. (t.t.). Climate Change and Migration in Southeast Asia: Responding to a New Human Security Challenge.

Firnanda Haumahu, J., H.J. De Fretes, C., & Romulo Simanjuntak, T. (2023). Diplomatic Protection Efforts of the Consulate General of the Republic of Indonesia in Johor Bahru for Indonesian Migrant Workers as the Domestic Helpers (PLRT) in 2018-2019. ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, 3(3), 335–347. https://doi.org/10.35877/soshum1839

Gammelgaard, B. (2017). Editorial: The qualitative case study. The International Journal of Logistics Management, 28(4), 910–913. https://doi.org/10.1108/IJLM-09-2017-0231

Hastira, M. F., & Maksum, A. (2025). RESILIENCE-BASED HUMAN SECURITY: A STUDY OF INDONESIAN MIGRANT CHILDREN AND MUHAMMADIYAH IN MALAYSIA. 5(2).

Kunarti, S., Afwa, U., & Hartini, S. (2023). Strengthening Migrant CARE: A Comprehensive Approach to Ensure Worker Protection and Safeguard the Rights of Indonesian Migrants. Journal of Law and Sustainable Development, 11(12), e1454. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.1454

Li, J., & Wang, Y. (2024). How Public Service Accessibility Affects Health of Migrants: Evidence from China. Risk Management and Healthcare Policy, Volume 17, 3065–3084. https://doi.org/10.2147/RMHP.S475634

Maemunah, M., Rejeki, S., Syahrial Haq, H., & Sakban, A. (2025). Legal Protection System for Children Left Behind by Indonesian Migrant Workers: A Multilevel SCII

Strategy Approach. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 13(3), 580–601. https://doi.org/10.29303/ius.v13i3.1845

Mello, P. A. (2017). Qualitative comparative analysis and the study of non-state actors. Dalam A. Kruck & A. Schneiker, Researching Non-State Actors in International Security (1 ed., hlm. 123–142). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315669830-11

Orginski, T. (t.t.). Protecting Children Affected by Migration: Expanded Lessons from the ASEAN Regional Programme and Global Policy Implications.

Piper, N., Rother, S., & Rüland, J. (2017). Challenging State Sovereignty in the Age of Migration. European Journal of East Asian Studies, 16(2), 191–192. https://doi.org/10.1163/15700615-01602005

Prabaningtyas, R. A. R. F., Pudjiastuti, T. N., Alami, A. N., Farhana, F., & Arfan. (2023). Access to Education for Refugee Children in Indonesia During the COVID-19 Pandemic: Challenges and Adaptation Strategies. Advances in Southeast Asian Studies, Vol. 16 No. 1, 39-61 Pages. https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0089

Putri, R. W., Kasmawati, Siregar, N., & Putri, Y. M. (2023). The Dynamics of Indonesian Migrant Workers' Problem (Regulation and Protection Based on Job Creation Law and International Civil Law). Dalam R. Perdana, G. E. Putrawan, B. Saputra, & T. Y. Septiawan (Ed.), Proceedings of the 3rd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2022) (Vol. 740, hlm. 769–777). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_74

Rifawan, A., Darmawan, I., & Relaksana, R. (2018). A REVIEW ON THE GOVERNANCE OF PROTECTION SYSTEM FOR INDONESIAN CITIZENS ABROAD. Jurnal Asia Pacific Studies, 1(2), 155. https://doi.org/10.33541/japs.v1i2.618

Silvia, T., Priyadi, B. P., & Dwimawanti, I. H. (2020). Analysis of Service Quality of Indonesian Workers Placement and Protection Service Center Semarang in Placement of Indonesian Migrant Workers. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal, 10(1), 12–21. https://doi.org/10.31289/jap.v10i1.2987